



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUGROHO CHRISTIJANTO**
2. Jabatan : **WAKIL DIREKTUR UTAMA**
3. NHK : **104481**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 6.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m2/80 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Bangunan Seluas 42 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Bangunan Seluas 22 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Bangunan Seluas 17 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Bangunan Seluas 17 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m2/293 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 3.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 981.000.000

1. MOBIL, NISSAN XTRAIL MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. MOTOR, VESPA SUPER SCOOTER Tahun 1964, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOBIL, NISSAN TEANA SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
4. MOBIL, TOYOTA COROLLA CROSS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000



5. MOTOR, HONDA BEAT STREET Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
18.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	395.508.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	3.872.325.056
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	40.140.335.442
F. HARTA LAINNYA	Rp.	757.870.137
Sub Total	Rp.	52.947.038.635
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	52.947.038.635

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.